

DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sanusi Fattah¹, Sultan Suhab², A. Nur Fadillah³,

¹Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Indonesia, fattahsanusi@gmail.com

²Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Indonesia, sultansuhab@yahoo.co.id

³Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Indonesia, andifadillahnur1479@gmail.com

E-mail Korespondensi: andifadillahnur1479@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of government expenditure and investment on income inequality through intervening variable, namely economic growth in South Sulawesi Province. This study uses secondary data obtained from Badan Pusat Statistik and other sources in the form of panel data consisting of time series data from 2014 to 2020 and cross sectional data obtained from 24 districts/cities in South Sulawesi Province. The data used are data on capital expenditure allocation, private investment, economic growth rate Regency/City in South Sulawesi Province which were analyzed using the Simultaneous Equation Model. The results showed that during the observation period the direct allocation of local government expenditures had a negative and significant effect on income inequality, while indirectly through economic growth had no effect on income inequality in South Sulawesi Province. Other results show that investment has an effect on income inequality either directly or indirectly through economic growth in South Sulawesi Province.

Keywords: Government Expenditure, Investment, Economic Growth, Income inequality

Pendahuluan

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antar daerah semakin besar. Indeks ketimpangan yang lazim dikenal dengan “Koefisien Gini” mencerminkan ketimpangan pendapatan rakyat dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) yang apabila skalanya mendekati angka satu, mencerminkan suatu ketimpangan sempurna.

Karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, maka tidak mengherankan bila pola pembangunan ekonomi wilayah di Indonesia tidak seragam. Ketidakteragaman ini akan berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang

pada gilirannya akan mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Pertumbuhan ekonomi sering kali diikuti dengan perubahan struktur pendapatan, terutama bagi negara yang sedang berkembang. Masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia ialah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah.

Pemerataan distribusi pendapatan merupakan hal yang penting dalam sebuah negara. Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan dua masalah besar di banyak Negara Sedang Berkembang (NSB), tidak terkecuali di Indonesia. Ketimpangan tidak dapat dirumuskan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar kesehatan dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses pertumbuhannya. Karenanya, mengherankan ketimpangan itu pastinya selalu ada, baik itu di negara miskin, negara sedang berkembang, bahkan negara maju sekalipun. Hanya saja yang membedakan adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing tersebut.

Sofyan (2010) mengemukakan bahwa kegagalan pemerataan distribusi pendapatan tidak hanya berpengaruh buruk terhadap bidang perekonomian saja, tetapi juga sosial, politik dan keamanan. Ketimpangan pendapatan akan menyebabkan tumbuhnya kecemburuan sosial dan kemiskinan yang nantinya dapat berujung pada resiko terbesar seperti kerusuhan dan gerakan separatis. Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Seringkali di negara-negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal daripada tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan.

Ketimpangan juga dapat dipicu oleh perbedaan pembangunan antar daerah. Adanya disparitas antar daerah semakin diperparah akibat tidak efisiennya pemerataan daerah seperti mobilitas tenaga kerja, upah, dan investasi (Piotr, 2009). Ketimpangan pendapatan yang tinggi tidak hanya dipandang sebagai masalah, tetapi juga sebagai sumber timbulnya masalah baru.

Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutannya. Ketimpangan yang tinggi dapat menurunkan pertumbuhan karena rumah tangga yang berpendapatan tinggi merampas kemampuan rumah tangga berpendapatan rendah untuk tetap sehat dan mengakumulasi modal fisik dan manusia. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya investasi dalam pendidikan karena anak-anak miskin berakhir di sekolah berkualitas rendah dan kurang mampu melanjutkan ke perguruan tinggi. Akibatnya, produktivitas tenaga kerja bisa lebih rendah daripada mereka yang memiliki pendapatan yang tinggi. Todaro dan Smith juga menjelaskan bahwa untuk menganalisis ketimpangan dapat diukur dengan menggunakan gini ratio dimana angkanya berkisar antara 0-1 yang digunakan sebagai ukuran ketimpangan agregat suatu wilayah.

Pembangunan ekonomi suatu negara dinyatakan berhasil jika terjadinya pertumbuhan ekonomi diiringi dengan berkurangnya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan terjadi apabila sebagian besar penduduk memperoleh pendapatan yang rendah dan pendapatan yang besar hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan merupakan dua unsur yang penting dalam proses pembangunan. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa diantara kedua aspek tersebut seringkali terjadi *trade off* antara satu dan lainnya, yaitu bilamana mendahulukan pemerataan maka akan cenderung memperlambat proses pertumbuhan (Sjafrizal, 2008).

Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dengan 21 Kabupaten dan 3 Kota didukung oleh data Produk Domestik Regional Bruto mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia. Hal ini disebabkan karena lapangan usaha utama seperti sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta pengangkutan dan komunikasi tetap berperan sebagai pendorong utama. Tetapi, walaupun memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, ketimpangan pendapatan di beberapa provinsi Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir masuk dalam provinsi di Indonesia dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang paling tinggi. Hal ini juga dapat dilihat pada gambar 1.

Klasifikasi pemerataan berdasarkan Koefisien Gini (KG) merupakan ukuran ketidakmerataan agregat yang memiliki nilai antara 0 (kemerataan sempurna) sampai dengan 1 (ketidakmerataan sempurna) bila nilai KG dari suatu negara berkisar antara 0,50-0,70 berarti ketidakmerataan tinggi, bila KG berkisar antara 0,36-0,49 berarti ketidakmerataan sedang, dan bila KG berkisar 0,20-0,35 berarti ketidakmerataan rendah.

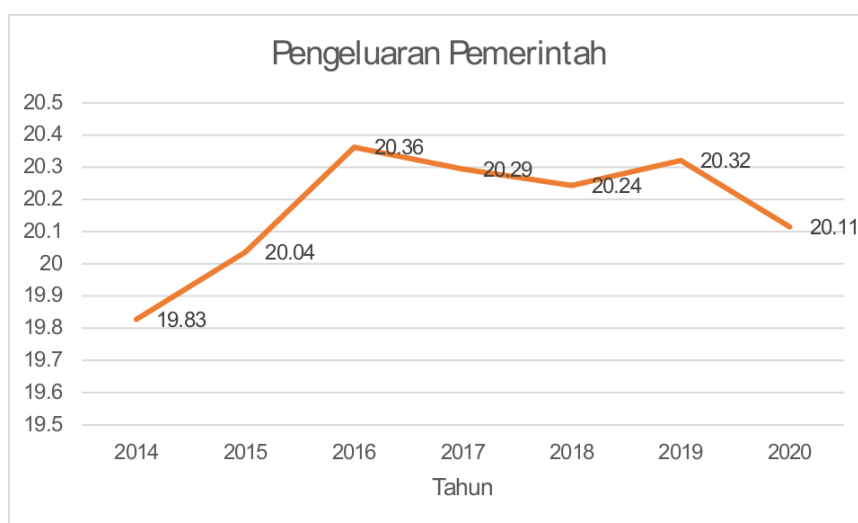
Gambar 1. Perkembangan *Gini Ratio* di Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Badan Pusat Statistik (2014 – 2020)

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa perkembangan Gini Ratio pada provinsi Sulawesi Selatan memiliki kecenderungan (trend) yang stagnan dalam periode 2014 sampai 2020 yang cenderung berada dalam klasifikasi ukuran ketidakmerataan sedang yaitu berkisar antara 0,36 – 0,49, Pada tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan yaitu dari 0,40 ke 0,38, dan pada tahun 2018 ke 2019 mengalami stagnan yaitu 0,37 dan pada tahun 2020 gini ratio mengalami kenaikan yaitu 0,40. Perkembangan gini ratio pada beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang kurang signifikan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pertumbuhan angkatan kerja dan investasi.

Gambar 2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun (2014-2020)

Salhab dan Soedjono (2012)¹ mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja langsung untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek-proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, jumlah belanja langsung pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu Rp. 20.32 dan gini ratio mengalami penurunan menjadi 0.389 begitu pula tahun lainnya.

Secara teori, peningkatan jumlah belanja modal pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat *gini ratio*, namun berdasarkan data yang diperoleh sebaliknya. Jumlah belanja modal pemerintah pada setiap provinsi di pulau Sulawesi mengalami peningkatan dan *gini ratio* juga mengalami peningkatan setiap tahunnya di provinsi Sulawesi Selatan Pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan sektor publik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika pemerintah banyak melakukan pengeluaran yang berorientasi ke sarana dan prasarana atau infrastruktur publik maka sektor-sektor perekonomian pun akan saling bergerak dalam mempermudah kegiatan ekonomi. Begitupula sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang baik bagi setiap manusia bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah.

Gambar 3 Perkembangan Investasi Sulawesi selatan



Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Diolah

Investasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Investasi menurut Mankiw (2003)² ialah komponen GDP (*Gross Domestic Product*) yang mengaitkan masa kini dan masa depan. Menurut data pada tahun 2016 jumlah investasi

meningkat tetapi gini ratio juga mengalami peningkatan, dimana investasi meningkat menjadi Rp 14.56 tetapi gini juga meningkat menjadi 0.426. Investasi dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

Menurut Aprilianto, Bayu dkk (2014)³ menunjukkan bahwa adanya investasi yang dilakukan di suatu daerah, baik itu asing (PMA) maupun domestik (PMDN) akan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja sehingga proses produksi menjadi produktif. Investasi asing di dalam masyarakat pertama-tama akan sangat membantu dan menambah kesempatan kerja, sehingga pendapatan masyarakat pun bertambah begitu juga dalam jaringan yang lebih luas dimana akan menambah pendapatan nasional suatu negara. Meratanya investasi di setiap daerah yang dapat dirasakan oleh masyarakat akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga kemudian akan memperkecil kesenjangan pendapatan yang terjadi antar daerah.

Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2004)⁴.

Menurut Kuznet (dalam Hidayat, 2016) ketimpangan dalam pembagian pendapatan cenderung semakin besar selama tahap-tahap awal pembangunan, setelah tahap awal yang berganti ke tahap-tahap lebih lanjut dari pembangunan terbalik menjadi lebih kecil. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan ekonomi pada tahap awal mengalami proses kemerosotan yang cukup besar dalam pembagian pendapatan yang baru terbalik menuju tingkat pemerataan yang lebih besar dalam pembagian pendapatan pada tahap pembangunan lebih lanjut. Dalam kurva yang ditunjukkan oleh Kuznet, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek terdapat korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan ketimpangan pendapatan, sebaliknya dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif. Pembangunan ekonomi pada saat ini menjadi salah satu syarat mutlak apabila suatu wilayah ingin mengalami pertumbuhan ekonomi. Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan

pembangunan yang dilaksanakan.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat digambarkan dari kemampuan daerah tersebut mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi setiap daerah berbeda-beda, ini dikarenakan potensi sumber daya alam setiap daerah berbeda-beda sehingga faktor produksi setiap daerah juga berbeda. Sumber daya alam dan faktor produksi setiap daerah ini mengarah ke Produk Domestik Bruto (PDRB), yaitu jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan prekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006).

Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar dikembangkan oleh Evsey Domar dan R.F. Harrod. Dalam teori Harrod-Domar, untuk menumbuhkan suatu perekonomian diperlukan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Inti dari teori Harrod-Domar yaitu, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi investasi baru sebagai stok penambah modal (Todaro, 2004)⁴.

Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. (1) Tahap awal, pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (2) Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. (3) Tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat (Mangkoesoebroto, 2001).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata melalui belanja negara baik itu belanja rutin maupun belanja pembangunan. Investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah modal serta memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi yang terkonsentrasi hanya di beberapa daerah akan menjadi salah satu faktor penyebab adanya ketimpangan mendapatkan profit yang menjanjikan yang akan dilirik oleh para investor dalam negeri maupun luar negeri. Investasi menurut Mankiw (2003)² adalah komponen GDP (*Gross Domestic Product*) yang mengaitkan masa kini dan masa depan.

Menurut Sultan dan Jazmani (2010) realita di negara berkembang dalam pembangunan terdapat kemajuan yang tidak merata antar daerah atau dengan kata lain terdapat tingkatan ketimpangan antar daerah. Seperti yang terjadi di Indonesia, secara geografis wilayah terdiri atas kepulauan menyebabkan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi ke wilayah pusat pemerintah dan pertumbuhan. Tidak meratanya tingkatan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah disebabkan oleh: konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah Alokasi investasi yang tidak merata; tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah; perbedaan Sumber Daya Alam (SDA) antar wilayah; perbedaan kondisi geografis antar wilayah; kurang lancarnya perdagangan antar provinsi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu ***“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah daerah, Investasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi”***.

Metodologi Kajian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup belanja langsung pemerintah, investasi, terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan melalui Pertumbuhan Ekonomi selama periode tahun 2014 sampai 2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data panel (pooled data) yaitu data gabungan antara data runtut waktu (time series) dari tahun 2014 sampai tahun 2020 dengan data cross sectional yang diperoleh dari 24 kab/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data alokasi belanja langsung pemerintah daerah, investasi daerah, laju pertumbuhan ekonomi, dan gini ratio masing-masing kab/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang disusun adalah



tahun 2014 sampai 2020 yang bersumber dari BPS dan sumber-sumber lainnya.

Adapun sumber data dalam penelitian ini diambil dari beberapa sumber diantaranya buku, tesis, skripsi, jurnal, Badan Pusat Statistik, dan berbagai situs yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel perantara. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan daerah, variabel independen dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah daerah dan investasi dan variabel perantara adalah pertumbuhan ekonomi.

Adapun metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesa adalah model regresi simultan (*Simultaneous Equation Model*). Metode ini digunakan ketika terdapat lebih dari satu persamaan dalam suatu model dan variabel dependen pada satu persamaan menjadi variabel penjelas pada persamaan yang lain (Salvatore dan Reagle, 2002). Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (pengeluaran pemerintah dan investasi) secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen (ketimpangan pendapatan), namun melalui variabel perantara (pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia). Adapun model persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = f(X_1, X_2,) \dots\dots\dots(1)$$

$$Y_2 = f(Y_1, X_1, X_2,) \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

Y_2 : Gini Ratio (indeks)

Y_1 : Pertumbuhan Ekonomi (persen)

X_2 : Belanja Langsung Pemerintah (Rp) X_1 : Investasi (Rp)

Kemudian dari fungsi diatas ditransformasikan ke dalam model non-linear sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha_0 \alpha^1 X^1 \alpha^2 X^2 \mu^1 \dots\dots\dots(1.a)$$

$$Y_2 = \beta_0 \beta^1 X^1 \beta^2 X^2 \mu^2 \dots\dots\dots(2.a)$$

Dimana α_0 dan β_0 adalah konstanta, sementara α_1 , α_2 , β_1 , β_2 , dan β_3 adalah masing-masing parameter yang akan diestimasi. Adapun μ_1 dan μ_2 adalah *random errors*. Karena persamaan di atas merupakan persamaan non-linear, kemudian persamaan di atas dilinearkan menjadi persamaan estimasi regresi secara simultan yang telah ditransformasikan menjadi linear

dengan menggunakan *logaritma natural* (Ln) sehingga persamaannya menjadi :

$$Y_1 = \text{Ln } \alpha_0 + \alpha_1 \text{Ln}X_{1it} + \alpha_2 \text{Ln}X_{2it} + \mu_1 \dots\dots\dots(1.b)$$

$$Y_2 = \text{Ln } \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}X_{1it} + \beta_2 \text{Ln}X_{2it} + \mu_2 \dots\dots\dots (2.b)$$

Selanjutnya persamaan (1.b) disubstitusi ke persamaan (2.b), sehingga di peroleh *reduced form*:

$$\text{Ln}Y_2 = \text{Ln}\beta_0 + \beta_1(\text{Ln}\alpha_0 + \alpha_1 \text{Ln}X_1 + \alpha_2 \text{Ln}X_2 + U_1) + \beta_2 X_1 + \beta_2 \text{Ln}X_2 + U_2$$

$$\text{Ln}Y_2 = (\text{Ln}\beta_0 + \beta_1 \text{Ln}\alpha_0) + (\beta_1 \alpha_1 + \beta_2) X_1 + (\beta_1 \alpha_2 + \beta_2) \text{Ln}X_2 + (\beta_1 U_1 + U_2)$$

$$\text{Ln}Y_2 = \delta_0 + \delta_1 \text{Ln}X_1 + \delta_2 \text{Ln}X_2 + U_{12}$$

Dimana:

$$\delta_0 = (\text{Ln}\beta_0 + \beta_1 \alpha_1) = \text{konstanta}$$

$$\delta_1 = (\beta_1 \alpha_1 + \beta_2) = \text{pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan}$$

$$\delta_2 = (\beta_1 \alpha_2 + \beta_2) = \text{pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan}$$

$$\mu_{12} = (\beta_1 U_1 + U_2) = \text{standard error}$$

Hasil Kajian dan Diskusi

Untuk menganalisis pengaruh Belanja langsung Pemerintah daerah dan Investasi daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi daerah berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 sampai 2019, maka dilakukan analisis regresi linear secara simultan yang mengestimasi besarnya pengaruh langsung maupun tidak langsung. Pada regresi linear secara simultan ini, yang menjadi variabel endogen adalah Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Y1) dan Ketimpangan Pendapatan (Y2) sedangkan variabel eksogen yaitu Belanja Langsung Pemerintah Daerah (X1) dan Investasi Daerah (Y2). Berikut hasil estimasi determinan ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Estimasi Variabel X dan Y pertumbuhan ekonomi (Y1) dan ketimpangan pendapatan (Y2)

Arah Pengaruh Antar Variabel	Koefisien Regresi ²	Probability	Keterangan	F- Teks
X1 terhadap Y1	0.188	0.061	Tidak Signifikan	11.456
X2 Terhadap Y1	0.237*	0.003	Signifikan	
X1 Terhadap Y2	-0.252*	0.000	Signifikan	55.008
X2 Terhadap Y2	-0.393*	0.000	Signifikan	
Y1 terhadap Y2	-0.315*	0.000	Signifikan	

*) Signifikan Pada $\alpha = 5\%$; R^2 Y1 =0,122; R^2 Y2 =0.502

Sumber : Data Diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai R^2 Pertumbuhan Ekonomi (Y1) yaitu sebesar 0.122. Berarti 12,2% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi perubahan seluruh variabel X yaitu X1 (Pengeluaran pemerintah) X2 (Investasi) sedangkan sisanya 87.8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Kemudian, untuk mengetahui besaran pengaruh langsung, tidak langsung, maupun pengaruh total sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Besaran pengaruh langsung, tidak langsung dan pengaruh total

Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total Pengaruh
X1 terhadap Y2	-0.252*		-0.308
X1 terhadap Y2 melalui Y1		-0.056*	
X2 terhadap Y2	-0.393*		-0.299
X2 terhadap Y2 melalui Y1		0.094*	

*) Signifikan $\alpha = 5\%$

Sumber : Data Diolah menggunakan SPSS

Adapun analisis pengaruh pengeluaran pemerintah (X1), Investasi (X2) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Ketimpangan Pendapatan (Y2) melalui Pertumbuhan Ekonomi (Y1)

Berdasarkan hasil analisis statistik yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel Belanja Langsung Pemerintah berpengaruh secara langsung terhadap Ketimpangan Pendapatan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar rasio belanja modal terhadap PDRB akan memberikan dampak pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat sehingga dapat mendukung pemerataan pendapatan. Penambahan belanja modal dapat mengurangi tingkat ketimpangan apabila menghasilkan rasio terhadap PDRB yang lebih besar dari sebelumnya. Artinya persentase kenaikan belanja modal harus melebihi persentase kenaikan PDRB pada tahun yang sama. Jadi variabel belanja modal dapat menjadi variabel penyeimbang dalam rangka menciptakan pemerataan ekonomi. Hasil ini sejalan dengan hipotesis yang ada dalam penelitian ini.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Ferry Sutiono (2018), dimana hasil regresi untuk variabel rasio belanja modal K/L dalam penelitian ini menghasilkan output berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Artinya bahwa semakin besar rasio belanja modal K/L terhadap PDRB akan memberikan dampak pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat sehingga dapat mendukung pemerataan pendapatan. Penambahan belanja modal K/L dapat mengurangi tingkat ketimpangan apabila menghasilkan rasio terhadap PDRB yang lebih besar dari sebelumnya. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Wahyuni dkk (2014)⁵ juga melakukan penelitian di Provinsi Bali dengan hasil yang sejalan dengan penelitian ini bahwa pengeluaran pemerintah berhubungan positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan masyarakat, hal ini berarti semakin besar pengeluaran pemerintah maka semakin besar disparitas atau semakin timpang pendapatan masyarakat.

Hasil yang sama diperoleh oleh Turnovsky (2015)⁶ yang dalam penelitiannya menemukan bahwa belanja pemerintah untuk modal publik akan meningkatkan ketimpangan kesejahteraan dari waktu ke waktu. Investasi pemerintah cenderung meningkatkan produktivitas modal swasta yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan distribusi hasil yang tidak merata antara pemilik modal dengan para buruh. Sabir (2015)⁷ dengan studi kasus di Provinsi Sulawesi Selatan juga menyimpulkan bahwa alokasi belanja modal pada APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya bahwa peningkatan belanja modal dalam APBD akan meningkatkan ketimpangan pendapatan

masyarakat. Hal ini disebabkan alokasi belanja modal lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur di daerah perkotaan dibandingkan alokasi di wilayah pedesaan.

Melalui Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Langsung Pemerintah berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai 2020. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memediasi secara parsial pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan. Karena jika belanja langsung pemerintah meningkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan akan menurun. Hasil ini sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini. Temuan ini juga sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Musgrave (Mangkoesoebroto, 2001) yang melihat dalam suatu proses pembangunan, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Rostow sendiri berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyedia prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan sendiri. Temuan ini sejalan dengan pandangan Rostow (Mangkoesoebroto, 2001) yang menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah pada tahap awal pembangunan ekonomi memiliki rasio yang besar terhadap pendapatan nasional. Pada tahap awal pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Selanjutnya pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap dilakukan guna memacu pertumbuhan ekonomi agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu posisi investasi pihak swasta pasti akan pula meningkat.

Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi mengimplikasikan bahwa investasi dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Teori Makro menggambarkan bahwa investasi dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah, apabila dari segi pelaksanaan investasi dilakukan oleh pihak swasta baik itu dalam negeri maupun asing dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (laba) dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bila mana income bertambah, konsumsi pun bertambah dan bertambah pula permintaan efektif. Investasi yang ditimbulkan bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut investasi terpengaruh atau induced investment. Ini mungkin dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta. Dalam teori Keynes didasarkan atas konsep *Marginal efficiency of investment* (MEI) lebih tinggi. Ekonomi di lain pihak, semakin besar investasi suatu negara maka akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi fungsi dari investasi.

Secara teoritis pula, *Harrod-Domar* telah menganalisa hubungan antara investasi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kedua ekonom tersebut menyimpulkan adanya hubungan ekonomi langsung antara besarnya stok modal keseluruhan (K), dengan GNP (Y), yang diformulasikan sebagai rasio modal/output (Capital output ratio, COR). Semakin tinggi stok modal, semakin tinggi pula output yang dihasilkan. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka akan terjadi penurunan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan bahwa fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi ternyata diiringi dengan gini ratio yang mengalami perubahan yang signifikan atau memiliki pengaruh.

Hasil estimasi variabel Investasi secara langsung memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kab/Kota pada tahun 2014 sampai 2020. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya Investasi akan meningkatkan angka ketimpangan, hal ini sejalan dengan teori Harrod-Domar yang menerangkan bahwa naiknya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita naik karena adanya kegiatan-kegiatan produktif. Dengan persebaran dan kenaikan investasi maka akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini sejalan dengan hipotesis yang ada dalam penelitian ini. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maqin (2011) bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Sedangkan Penelitian Wahyuni, dkk (2014)⁵ sejalan dengan hasil penelitian ini, dimana Investasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada kesenjangan pendapatan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2000 sampai 2012. Pengaruh yang negatif tersebut memiliki arti yaitu Investasi meningkatkan dapat menurunkan angka ketimpangan disparitas atau kesenjangan pendapatan pula. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradnyadewi (2015)⁸ yang mengemukakan bahwa pengaruh investasi terhadap distribusi pendapatan itu tidak signifikan secara langsung di provinsi Bali.

Melalui Pertumbuhan Ekonomi, Investasi juga memiliki pengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan, artinya Hasil penelitian ini disebabkan karena Investasi memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi begitupun Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan yang juga memiliki pengaruh, sehingga secara keseluruhan pengaruh tidak langsung Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh. Artinya, jika investasi meningkat maka akan menurunkan pertumbuhan

ekonomi dan menurunkan angka ketimpangan pendapatan daerah. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang ada dalam penelitian ini.

Hubungan antara Investasi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya ini mengindikasikan bahwa secara langsung perubahan investasi daerah akan meningkatkan dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat juga, karena investasi mendorong peningkatan produksi barang dan jasa sehingga investasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hasil ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar yang memberikan peranan kunci kepada Investasi dalam Pertumbuhan Ekonomi. Harrod-Domar mengemukakan bahwa pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui akumulasi tabungan, pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Menurut teori tersebut, untuk meningkatkan laju perekonomian, maka diperlukan Investasi-investasi baru sebagai stok tambahan modal. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Handayani (2011)⁹ menunjukkan bahwa dengan adanya Investasi berupa pembelian barang modal dan pelengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian sehingga hal ini dapat meningkatkan PDB riil Indonesia dan dengan demikian akan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penutup

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi dari sisi supply penawaran perannya terhadap belanja pemerintah tidak cukup untuk mendorong dan meningkatkan produksi PDRB dari sisi supply karena pemerintah memang tidak berperan di dalam memproduksi barang dan jasa (*private/non-public*) sehingga perubahan yang terjadi ke belanja pemerintah tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan pemerintah melalui pengeluaran pemerintah khususnya pemerintah daerah blum bisa dijadikan sebagai tidak cukup untuk menjadi instrumen di dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tapi cukup relevan penting menurunkan ketimpangan jadi alokasi belanja pemerintah

itu mampu mendorong merurunnya ketimpangan pendapatan daerah, berarti orientasi pengeluaran pemerintah daerah lebih konsen untuk menurunkan ketimpangan pendapatan daerah di bandingkan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja Langsung Pemerintah berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Belanja langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan di Sulawesi Selatan. Hubungan Belanja Modal Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan secara tidak langsung melalui Pertumbuhan Ekonomi memberikan hasil yang berpengaruh, di mana setiap perubahan yang terjadi pada Belanja Modal Pemerintah akan memiliki pengaruh terhadap angka Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Investasi berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada penelitian berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan dan secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan melalui Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya perubahan yang terjadi pada Investasi berpengaruh terhadap angka Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 sampai 2020. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, karena investasi mendorong peningkatan produksi barang dan jasa sehingga investasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, kajian ini merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Pemerintah harus dapat mendorong Pertumbuhan ekonomi sisi demandnya saja karena perannya terhadap belanja pemerintah tidak cukup untuk mendorong dan meningkatkan produksi PDRB dari sisi supply saja karena pemerintah memang tidak berperan di dalam memproduksi barang dan jasa (*private/non-public*) sehingga perubahan yang terjadi ke belanja pemerintah tidak kecuali jika dilihat dari sisi demand berbeda dengan investasi karena investasi mendorong peningkatan produksi barang dan jasa sehingga investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan pemerintah melalui pengeluaran pemerintah khususnya pemerintah daerah belum bisa dijadikan sebagai atau tidak cukup untuk menjadi instrumen di dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tapi cukup relevan penting menurunkan ketimpangan jadi alokasi belanja pemerintah itu mampu mendorong merurunnya

ketimpangan pendapatan daerah berarti orientasi pengeluaran pemerintah daerah lebih konsen untuk menurunkan ketimpangan di bandingkan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Pemerintah masing-masing kabupaten/kota di harapkan mampu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi permasalahan masing-masing daerah di kabupaten/kotanya agar ketimpangan distribusi pendapatan dapat dicegah, dari pengalokasian dana daerah dan pemeretaan investasi di setiap daerah di masing-masing kabupaten/kota di provinsi Sulawesi selatan.

Referensi

- [1] Salhab, Amira dan Soedjono, Lasmini 2012. Pengaruh Inflasi, Jumlah Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana.
- [2] Mankiw N, Georgy. (2003). Teori Makro Ekonomi (Edisi ke-5), terjemahan Imam Nurmawan, Jakarta: Penerbit Erlangga
- [3] Aprilianto, Bayu. Novi Wulandari dan Taufik Kurrohman. 2014. Perilaku Investor Saham Individual Dalam Pengambilan Keputusan Investasi: Studi Hermeneutika Krisis e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2014, Volume 1 (1): 16-31
- [4] Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C. (2004). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [5] Wahyuni, I Gusti Ayu Putri, Sukarsa, Made Yuliarmi, Nyoman. Pengaruh pengeluaran pemerintah dan Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2000 sampai 2012. E-Journal. Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, Vol.3, No.8.
- [6] Turnovsky, Stephen J. 2015. "Economic Growth and Inequality: The Role of Public Investment". Journal of Economic Dynamis and Control, Vol.61, Issue C, 204-221.
- [7] Sabir, (2015). Pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008.2013. Disertasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- [8] Pradnyadewi, Diah dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2017. Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Volume 6.

- [9] Handayani, Tri. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 1999-2008. Yogyakarta